

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemiskinan merupakan satu masalah yang selalu dihadapi manusia sejak lama. Implikasi masalah kemiskinan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain kemiskinan adalah masalah sosial yang bersifat mendunia, yang berarti melibatkan seluruh dunia. Pada umumnya setiap negara akan berusaha dalam hal mengatasi kemiskinan, terutama pada negara berkembang. Kemiskinan menghambat pembangunan suatu negara untuk mencapai kestabilan ekonomi. Banyak regulasi atau aturan yang diterapkan baik secara internasional maupun regulasi dari negara tersebut. Salah satu negara yang masih kesusahan dalam menghadapi kemiskinan adalah Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang sehingga regulasi yang diterapkan tidak bisa secara umum diterapkan kepada semua wilayah. Karena terdapat faktor – faktor tertentu yang menyebabkan kemiskinan.

Dalam suatu negara, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian pada suatu negara tersebut. Nurkse menjelaskan: “Lingkaran setan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Si miskin, misalnya, selalu kurang makan; karena kurang makan, kesehatannya menjadi buruk; karena fisiknya lemah kapasitas kerjanya rendah; karena kapasitas kerjanya rendah penghasilannya pun rendah, dan itu berarti ia miskin, akhirnya ia tidak akan mempunyai cukup makan; dan seterusnya. Bila keadaan seperti ini dikaitkan dengan negara secara keseluruhan

dapat dikemas ke dalam dalil kuno: „Suatu negara miskin karena ia miskin”(Rahman & Alamsyah, 2019).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan – kenutuhan utama yang harus dipenuhi adalah anantara lain pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan (poverty) masih menjadi salah satu fenomena sosial yang selalu ada di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Suryandari, Murmalita,A., 2017).

Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas dan terdiri dari 5 pulau besar yaitu : Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di dalam pembangunan Indonesia memiliki berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang cukup kompleks adalah kemiskinan. Dalam wilayah yang begitu luas mayoritas penduduk Indonesia bertempat di Pulau Jawa, sehingga pulau jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dengan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang tinggi.

Pulau jawa terdiri dari 6 provinsi yakni : Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan angka persentasi kemiskinan dengan angka 11,32 %. Tertinggi kedua setelah D.I Yogyakarta sebesar 11,97 % di Pulau Jawa. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka persentasi kemiskinan Provinsi

Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11,32 % turun dari posisi 13,01 % pada tahun 2017 maupun pada tahun 2016 sebesar 13,27 %. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 4,49 naik pada tahun 2017 sebesar 4,52 dan pada tahun 2018 naik menjadi 4,59. Akan tetapi menurut para analisis ini adalah angka semu yang dimana masih bisa bergerak secara fluktuatif tergantung dari kebijakan dan bantuan sosial dari pemerintah. Jika ada kejadian diluar kendali maka angka persentase kemiskinan akan naik dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi turun.

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa

PROVINSI	2016	2017	2018	2019
DKI JAKARTA	3,75	3,78	3,55	3,42
JAWA BARAT	8,77	7,83	7,25	6,85
JAWA TENGAH	13,19	12,23	11,19	10,58
DI YOGYAKARTA	13,1	12,36	11,81	11,44
JAWA TIMUR	11,85	11,2	10,85	10,2
BANTEN	5,36	5,59	5,25	4,94

Sumber : BPS Jatim, Kemiskinan dalam angka 2019

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Enam Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	394.200	382.000	373.000	362.300
Jawa Barat	4.152.600	3.934.833	3.615.800	3.399.200
Jawa Tengah	4.151.500	4.072.800	3.897.200	3.743.230
Jawa Timur	4.571.500	4.412.600	4.332.590	4.112.250
DI Yogyakarta	492.560	482.500	460.100	448.470
Banten	683.570	671.390	661.360	654.460

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2019

Jawa Tengah masih menempati posisi kedua setelah Jawa Timur. Hal ini menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah penduduk

dan persentase penduduk miskin terbanyak. Dapat dilihat dalam tabel diatas terdapat penurunan angka jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa di setiap provinsinya. Hal ini membuktikan adanya upaya pemerintah pusat dalam hal memberantas atau menekan jumlah kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berfokus menurunkan penduduk miskin dengan membantu para investor untuk berinvestasi pada usaha – usaha padat karya yang banyak Di Jawa Tengah. Sejalan dengan itu banyak program pelatihan yang diupayakan untuk meningkatkan daya saing masyarakat Di Jawa Tengah, dengan begitu diharapkan kemiskinan akan berkurang secara signifikan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dalam keberhasilan dari pembangunan ekonomi, dimana negara dapat menyediakan barang – barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Tadoro (Nugroho, 2015) pertumbuhan ekonomi suatu negara memiliki tiga komponen penting sebagai penentu utama yaitu : (i) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia; (ii) pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja ditahun – tahun mendatang; (iii) kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat (Nugroho, 2015).

Di Provinsi Jawa Tengah salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan di suatu daerah ditinjau dari ekonominya, misalnya dengan meningkatnya PDRB (Produk Domestik Bruto) di daerah tersebut. PDRB berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, hal ini menyatakan bahawa pemerintah mampu menekan tingkat kemiskinan. PDRB merupakan pendapatan yang dihasilkan melalui semua kegiatan ekonomi di daerah tersebut dalam satu periode tertentu, semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi pula penerimaan daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapitanya maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Provinsi Jawa Tengah memiliki pendapatan PDRB yang tinggi, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduknya saja tetapi bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakatnya, serta mampu mensejahterakan penduduk. Tabel 1.3 menyajikan data PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2019.

Tabel 1.3
PDRB dan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan Tahun 2000 di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2010 - 2019

Tahun	PDRB HK 2000 (Rp Juta)	Jumlah Penduduk (Orang)	PDRB Perkapita (Rupiah)
2010	623.224.621,32	32.382.657	1.925.000
2011	658.003.645,36	32.725.378	2.011.000
2012	690.461.017,10	32.998.692	2.095.000
2013	726.652.111,10	33.264.339	2.184.000
2014	763.219.714,00	33.522.663	2.277.000
2015	805.107.511,97	33.774.141	2.384.000
2016	849.077.575,89	34.019.095	2.496.000
2017	893.726.881,95	34.257.865	2.609.000
2018	941.074.049,63	34.490.835	2.728.000
2019	990.664.597,29	34.718.200	2.853.000

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2019

Tabel 1.3 diatas terlihat bahwa laju pendapatan PDRB (Produk Domestik Bruto) per kapita di Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan secara terus menerus. Mulai tahun 2010 – 2019 terlihat kondisi ekonomi yang mengingkat dari tahun ketahun dengan jumlah PDRB tertinggi Rp 990.664.597,29 juta pada tahun 2019 dan PDRB terendah Rp 623.224.621,32 juta pada tahun 2010. Pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Tengah berlangsung secara berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Dimana pertumbuhan PDRB per kapita masyarakat meningkat dari tahun ketahun. Terlihat pada tabel 1.3 dimana pada tahun 2010 PDRB per kapita sebesar Rp1.925.000, sedangkan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 2.853.000. PDRB perkapita penduduk Jawa Tengah meningkat pesat di tahun 2019 daripada tahun 2010. Hal ini mencerminkan kemakmuran penduduk meningkat dari tahun ketahun. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Selain PDRB, variabel yang mempengaruhi kemiskinan adalah jumlah penduduk. Dimana semakin banyak penduduk yang berada disuatu tempat atau wilayah maka kebutuhan akan barang – barang ekonomi yang diperlukan akan semakin banyak. Jumlah penduduk jika tidak dikendalikan dengan seksama maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tidak akan terkendali (baby booming) serta dapat mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi,

yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) terdapat pengaruh langsung antara pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana ditunjukkan pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan tidak memiliki perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan dan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Pendidikan termasuk salah satu hal terpenting dalam hal pemberantasan kemiskinan. Pendidikan dikatakan sebagai tindakan persuasi atau pembelajaran untuk masyarakat mau melakukan tindakan - tindakan untuk menyelesaikan masalah. Masyarakat yang memiliki pendidikan akan melakukan tindakan dimana seseorang akan memikirkan kesejahteraan dirinya. Baik dalam hal kebutuhan sehari – hari maupun kesehatan, sehingga seseorang akan menjadi kreatif untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan pendidikan yang tinggi akan mempermudah pemerintah dalam menekan jumlah masyarakat miskin dikarenakan masyarakat memiliki pemikiran yang lebih tinggi.

Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi akan sadar peluang dan bertindak lebih kreatif. Sehingga akan menumbuhkan peluang lapangan pekerjaan yang baru dan akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Dimana semakin banyak lapangan pekerjaan maka akan semakin banyak juga masyarakat yang bekerja dan akan mengurangi pengangguran. Dengan hal ini kemiskinan dapat dikurangi dan akan meningkatkan pendapatan daerah serta akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.4
Angka Partisipasi Murni Provinsi Jawa Tengah 2010-2019

Tahun	APM SD (persen)	APM SMP (persen)	APM SMA (persen)
2010	95.93	69.92	45
2011	90.19	69.77	47.34
2012	92	72.51	50.98
2013	95.65	75.02	51.72
2014	96.45	78.57	58.11
2015	96.57	78.66	58.27
2016	96.64	78.89	58.49
2017	97.13	79.13	59.20
2018	97.75	79.31	59.31
2019	97.77	79.84	59.35

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2019

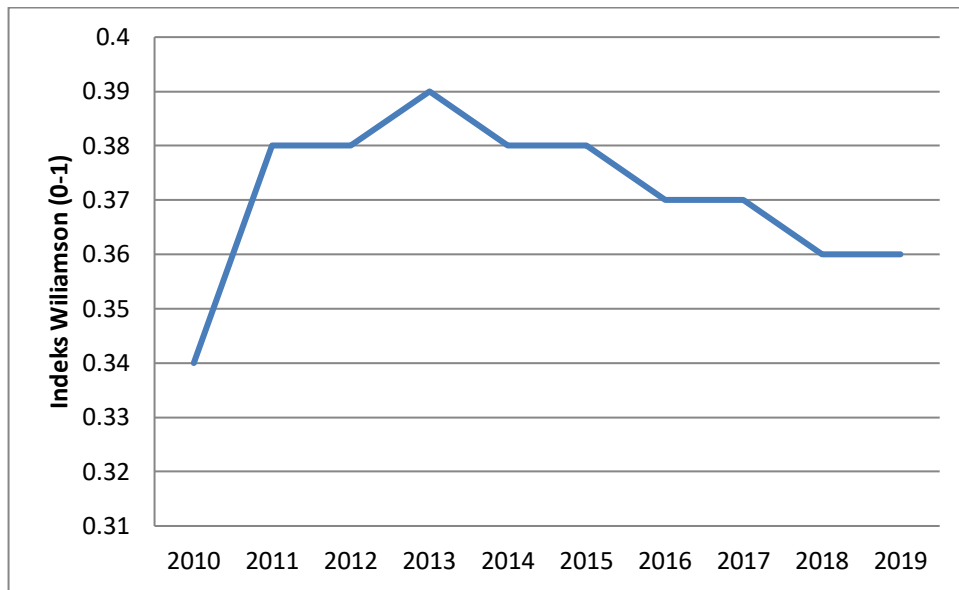
Berdasar tabel 1.4 menunjukkan Angka Partisipasi Murni masyarakat Provinsi Jawa Tengah dari tahun ketahun meningkat. Pada tahun 2012 dan tahun 2014 terdapat peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012 sebesar 50,98 % dari 47,34 % pada tahun 2011, dan tahun 2014 sebesar 58,11 % dari 51,72 % pada tahun 2013. Akan tetapi setelah tahun 2014 tidak ada peningkatan yang signifikan. Dapat disimpulkan pemerintah membuat peraturan yang dimana membuat angka partisipasi masyarakat meningkat dengan signifikan. Meskipun setiap tahun angka partisipasi murni meningkat akan tetapi laju peningkatan masih lambat.

Potensi daerah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain sumber daya manusia yang masih rendah tidak dapat memanfaatkan keunggulan tersebut secara maksimal. Untuk memanfaatkan potensi tersebut masih perlu kebijakan baik dari tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten. Akibat kondisi pendidikan masyarakat yang rendah secara umum mengakibatkan pendapatan masyarakat masih rendah

serta meningkatkan jumlah keluarga miskin. Pendidikan sangat berpengaruh pada menurunnya kemiskinan dimana pembangunan melalui pendidikan akan menekan angka kemiskinan serta agar masyarakat memiliki pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang baik.

Kemakmuran wilayah tidak semata-mata dihitung dengan tingkat kemiskinan yang rendah, pendapatan daerah yang besar, serta pendapatan perkapita yang tinggi. Akan tetapi patut diperhitungkan juga dengan pemerataan pendapatan yang didistribusikan. Ketimpangan antar daerah berdampak pada kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin bertambah lebar akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Dimana akan timbul kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang berada di wilayah relatif miskin (*underdeveloped region*) kepada daerah yang relatif kaya atau maju (*developed region*). Penyebab utama terdapat keluarga miskin dikarenakan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kebutuhan yang mereka perlukan akan semakin banyak. Dalam hal ini segi perekonomian mereka akan semakin memburuk dengan seiringnya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Gambar 1.1 menunjukkan ketimpangan dari Provinsi Jawa Tengah, dimana setiap tahun ketimpangan bergerak fluktuatif akan tetapi cenderung menurun. Disini dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah tergolong sedang dan memperlihatkan pemerataan pendapatan belum merata. Dengan tingkat ketimpangan sedang, dimana perbedaan status sosial kaya dan miskin di Provinsi Jawa tengah masih banyak terjadi.

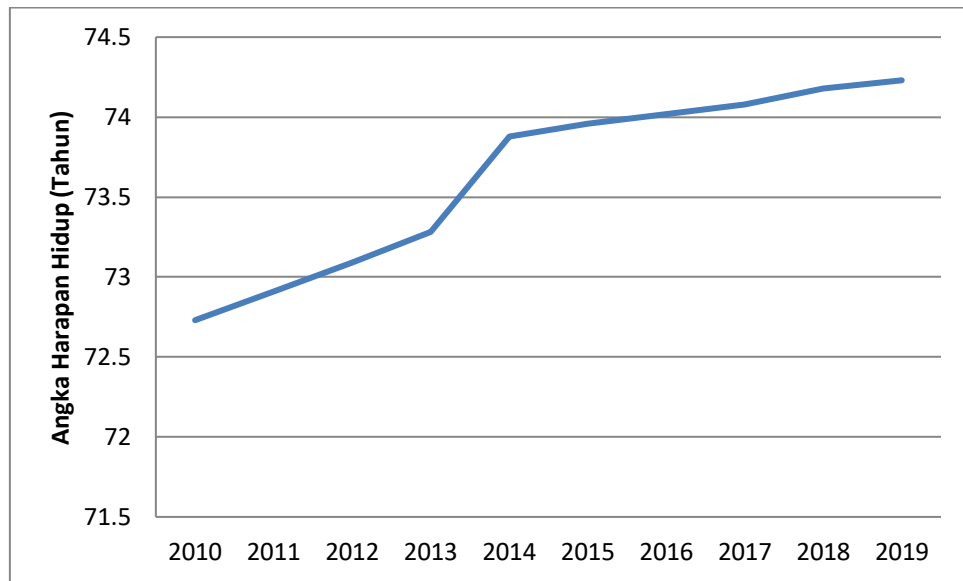


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2019

Gambar1.1

Indeks Wiliamson Jawa Tengah Tahun 2010 – 2019

Selain itu faktor kesehatan juga perlu diperhatikan dalam hal indikator kemiskinan. Kesehatan merupakan hal penting setiap manusia untuk menjalankan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi masyarakatnya dengan berbagai layanan kesehatan baik sarana dan prasarana kesehatan serta bantuan sosial kepada masyarakat. Meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat tinggi. Ketika masyarakatnya memiliki kesehatan yang tinggi dan terjamin maka tingkat produktifitas wilayah tersebut akan meningkat. Bukan hanya untuk memberantas kemiskinan akan tetapi kesehatan juga dapat meningkatkan pendapatan dari wilayah tersebut. Sehingga terdapat pengaruh dimana pemerataan akan distribusi pendapatan akan menjadikan maju wilayah tersebut. Ketika pemerataan pendapatan dan pembangunan terjadi akan meningkatkan kemakmuran masyarakat.



Sumber : Bps Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2019

Gambar 1.2
Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2019

Berdasar gambar 1.2 menunjukkan dari tahun ketahun, harapan hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah semakin tinggi. Akan tetapi angka harapan hidup ini masih terbilang sedang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat judul **“Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Ketimpangan, dan Keesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019 ?

2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh Kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menemukan pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019.
2. Menganalisis dan menemukan pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019.
3. Menganalisis dan menemukan pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019.
4. Menganalisis dan menemukan pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019.
5. Menganalisis dan menemukan pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada :

1. Penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

2. Pemerintah daerah sebagai pertimbangan alternatif untuk menyusun kebijakan ekonomi dan sebagai sumber informasi tentang kinerja masing-masing sektor serta mengambil kebijakan atas terjadinya kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Akademisi sebagai tambahan referensi mengenal masalah kemiskina

